Simbiosis Pasar dan Tradisi: Kritik Ontologis atas Keterikatan Kapitalisme dan Nilai-Nilai Konservatif

Hizkia Yesaya Napitupulu

Abstrak

Di beberapa negara Barat seperti Amerika Serikat, kapitalisme dan konservatisme sering dianggap bersesuaian secara ideologis, namun kedua hal itu menyimpan pertentangan mendasar pada level ontologis. Pasar beroperasi atas prinsip likuiditas, komodifikasi, dan dinamika tiada henti (*becoming*), sementara tradisi bersandar pada prinsip keabadian, ikatan komunitas, dan ketetapan moral (*being*). Esai ini bermaksud untuk membedah bagaimana keterikatan keduanya bukanlah sesuatu yang harmonis, melainkan sebuah simbiosis parasitis. Kapitalisme secara cerdik memanfaatkan nilai-nilai konservatif sebagai pelindung dan jaminan untuk melegitimasi dirinya, sembari secara perlahan melikuidasi tatanan tradisi tersebut demi ekspansi modal. Pada akhirnya, persekutuan kedua hal ini bersifat kontradiktif dan tidak berkelanjutan: kebebasan pasar yang tanpa batas secara sistematis justru menghancurkan tatanan moral yang berusaha dipertahankan oleh tradisi.

Kata Kunci: Ontologi Pasar, Tradisi, Komodifikasi, Simbiosis Parasitis, Legitimasi Kapitalisme.

Pendahuluan

Bagi beberapa negara, hubungan antara kapitalisme pasar bebas dan konservatisme tampaknya diperlakukan sebagai sebuah persekutuan wajar (*natural alliance*) dalam arena politik modern. Narasi arus utama mereka cenderung menempatkan keduanya sebagai dua pilar yang saling menopang dalam mempertahankan kebebasan individu, hak milik, dan ketertiban sosial. Namun, di balik harmonisasi elektoral dan retorika politik tersebut, tersembunyi sebuah ketegangan filosofis yang mendasar. Kapitalisme, dengan dorongan intrisiknya menuju akumulasi modal tanpa batas dan inovasi tiada henti, secara inheren bersifat disruptif dan destruktif terhadap tatanan yang ada (Schumpeter, 1942). Sebaliknya, nilai-nilai konservatif justru berakar pada komitmen untuk keberlanjutan tradisi, menjaga kontinuitas sejarah, dan merawat institusi-institusi organik yang melindungi manusia dari komodifikasi total (Burke, 1790; Scruton, 2014). Ketegangan ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah keterikatan antara pasar bebas dan tradisi merupakan sebuah keselarasan esensial, ataukah sekadar akumulasi kompromi pragmatis?

Melalui kacamata ontologi—yakni cabang filsafat yang menyelidiki hakikat keadaaan dan struktur mendasar dari realitas (Rescher, 1996)—hubungan ini tidak bisa lagi hanya dipahami sebagai pilihan taktis dalam politik praktis. Secara ontologis, pasar mendefinisikan realitas melalui prinsip likuiditas, efisiensi, dan pertukaran nilai ekonomi yang terus berubah, sedangkan tradisi mendasarkan eksistensinya pada

keabadian, ketetapan moral, dan keterikatan pada ruang serta waktu tertentu. Ketika dua modus eksistensi yang saling bertolak belakang ini menyatu, terjadi sebuah fenomena yang paradoks: pasar membutuhkan stabilitas moral yang disediakan oleh nilai-nilai konservatif untuk melegitimasi dirinya, namun pada saat yang sama, dinamika internal pasar secara perlahan mengikis landasan tradisi itu sendiri (Polanyi, 1944; Streeck, 2016).

Esai ini berargumen bahwa hubungan antara kapitalisme dan nilai-nilai konservatif bukanlah sebuah harmonisasi ontologis yang sejati, melainkan sebuah simbiosis parasitis dan kooptatif. Kapitalisme memanfaatkan struktur moral, keluarga, dan ketertiban komunitas yang dipelihara oleh tradisi sebagai "modal sosial" gratis untuk meredam dampak sosial dari ketidakstabilan pasar, sembari terus merusak akar-akar tradisi tersebut demi ekspansi komodifikasi.

Landasan Teoretis: Definisi Ontologis Pasar dan Tradisi

Untuk mengurai ketegangan mendasar antara kapitalisme dan nilai-nilai konservatif, langkah konseptual pertama yang harus dilakukan adalah memetakan status ontologis dari kedua entitas tersebut. Ontologi tidak sekadar membahas fungsi praktis atau manifestasi sosiologis dari pasar dan tradisi, melainkan meneliti modus keberadaan (*mode of being*) dan prinsip-prinsip konstitutif yang membentuk hakikat realitas keduanya. Tanpa pemahaman mendalam tentang struktur ontologis masing-masing, analisis terhadap hubungan

keduanya berisiko terjebak dalam batas-batas retorika politik dangkal.

1. **Ontologi Pasar: Realitas yang Dinamis, Likuid, dan Aksidental**

Secara ontologis, pasar dalam sistem kapitalisme modern tidak dipahami sekadar sebagai tempat fisik pertukaran barang, melainkan sebagai sebuah proses rasionalisasi realitas yang dinamis, kuantitatif, dan terus mengalir (Hayek, 1945; Mises, 1949). Kategori ontologis utama dari pasar adalah *likuiditas* dan perubahan terus-menerus (*becoming*). Dalam kerangka berpikir rasionalitas ekonomi, setiap entitas—baik barang, jasa, waktu, bahkan hubungan antarmanusia—dipandang sebagai komoditas yang nilainya ditentukan oleh ketersediaan dan permintaan relatif yang selalu berfluktuasi (Polanyi, 1944).

Dalam modus eksistensi pasar ini, sifat-sifat entitas bersifat aksidental dan substitutif (dapat digantikan). Suatu objek atau nilai tidak memiliki harga intrinsik yang permanen; keberadaannya didefinisikan sejauh mana ia dapat dikuantifikasi ke dalam satuan nilai tukar atau uang (Simmel, 1907). Oleh karena itu, ontologi pasar bertumpu pada prinsip instrumentalisme murni: realitas dievaluasi berdasarkan efisiensi, akumulasi, dan kemampuannya untuk dikonsumsi. Keabadian atau ketetapan dalam pasar justru dipandang sebagai hambatan (*inefficiency*) yang mengurangi kecepatan sirkulasi modal.

2. Ontologi Tradisi: Realitas yang Transenden, Konstan, dan Substantif

Sebaliknya, tradisi dalam perspektif filsafat konservatif memiliki konstitusi ontologis yang berakar pada keterikatan, kontinuitas, dan keabadian (*being*). Tradisi bukanlah sekadar kebiasaan lama yang diulang-ulang secara mekanis, melainkan sebuah manifestasi dari tatanan moral transenden dan akumulasi kearifan kolektif lintas generasi yang memberi bentuk pada eksistensi manusia (Burke, 1790; Oakeshott, 1962).

Secara ontologis, tradisi menegaskan bahwa realitas manusia diikat oleh hubungan-hubungan substantif yang bersifat non-instrumental—seperti ikatan keluarga, komunitas lokal, nilai keagamaan, dan tanggung jawab terhadap warisan masa lalu serta generasi mendatang (MacIntyre, 1981; Scruton, 2012). Berbeda dengan pasar yang menetralkan ruang dan waktu demi mempercepat pertukaran komoditas, tradisi bersifat partikular dan berakar (*rooted*); ia sangat terikat pada tempat, konteks sejarah, dan memori kolektif yang unik. Dalam kerangka ini, nilai suatu entitas adalah intrinsik dan tidak dapat dengan mudah disepadankan atau digantikan oleh nilai tukar materiil semata.

Tabel 1. Perbedaan dimensi Ontologis

Dimensi	Pasar (Kapitalisme)	Tradisi (Konservatisme)
Prinsip Utama	Likuiditas, perubahan, efisiensi	Kontinuitas, ketetapan, warisan moral
Sifat Nilai	Kuantitatif, instrumental, substitutif	Kualitatif, intrinsik, tak tergantikan
Kerangka Waktu	Masa depan yang terakselerasi, kekinian	Matriks lintas generasi (masa lalu, kini, mendatang)
Ruang Eksistensi	Global, universal, abstrak	Partikular, lokal, berakar

Pertemuan kedua modus keberadaan ini menciptakan sebuah landasan teoretis yang penuh kontradiksi. Pasar mengonstruksi realitas sebagai arena terbuka tanpa batas untuk ekspansi dan desakralisasi, sedangkan tradisi memandang realitas sebagai tatanan organik terstruktur yang membutuhkan batas-batas moral dan perlindungan agar tidak terurai.

Titik Temu Ontologis: Hak Milik Pribadi dan Tatanan Alamiah (*Natural Order*)

Meskipun secara teoritis pasar dan tradisi bertumpu pada modus keberadaan yang saling bertolak belakang—dimana dinamika likuiditas melawan ketetapan tatanan—sejarah pemikiran politik dan ekonomi mencatat aliansi yang sangat erat di antara keduanya. Aliansi ini bukan semata-mata hasil kesepakatan kompromi politik pragmatis, melainkan dibangun di atas fondasi konseptual yang seolah-olah mempertemukan keduanya pada level ontologis. Titik temu konseptual tersebut utamanya berakar pada dua pilar fundamental: hak milik pribadi (*private property*) dan gagasan tentang tatanan alamiah (*natural order*).

1. Hak Milik Pribadi sebagai Ekstensi Diri dan Penjamin Stabilitas

Dalam tradisi filsafat politik klasik, hak milik pribadi dipandang bukan sekadar instrumen hukum ekonomi, melainkan sebagai kondisi ontologis bagi keberadaan manusia yang bebas dan bermoral (Locke, 1689; Hegel, 1821). Bagi kaum konservatif, milik pribadi adalah sarana tempat kepribadian, tanggung jawab moral, dan memori keluarga mengejawantah ke dalam bentuk fisik. Tanah, rumah, dan aset lokal berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan seseorang dengan generasi sebelum dan sesudahnya (Burke, 1790; Scruton, 2012). Milik pribadi memberikan batas-batas yang melindungi individu dan komunitas dari campur tangan otoritas eksternal yang arbiter, seperti negara absolut.

Pada saat yang sama, kapitalisme menempatkan hak milik pribadi sebagai syarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi berfungsinya pasar bebas. Tanpa jaminan hukum atas hak milik yang mutlak, sirkulasi modal, akumulasi kekayaan, dan kepastian kontrak tidak dapat berlangsung secara efisien (Alchian & Demsetz, 1973; North, 1990). Di titik inilah terjadi pertautan: baik pasar maupun tradisi melihat hak milik sebagai garis pertahanan utama melawan distorsi tatanan sosial. Bagi konservatisme, milik pribadi mempertahankan stabilitas tradisi; bagi kapitalisme, milik pribadi menjamin kepastian pertukaran ekonomi.

2. Tatanan Alamiah (*Natural Order*) dan Tatanan Spontan (*Spontaneous Order*)

Keterikatan ontologis kedua semakin diperkuat oleh persepsi bersama bahwa tatanan sosial yang stabil tidak boleh dipaksakan dari atas melalui rekayasa sosial (*social engineering*), melainkan harus tumbuh secara intuitif dan alamiah.

- **Perspektif Konservatif:** Pemikiran konservatif meyakini adanya tatanan moral alamiah (*natural moral order*) yang terwujud dalam hierarki organik, lembaga keluarga, kebiasaan lokal, dan tradisi keagamaan yang diuji oleh waktu (Kirk, 1953). Lembaga-lembaga ini ada bukan karena dirancang secara rasional oleh manusia, melainkan karena tumbuh secara rasional dari pengalaman kolektif lintas generasi.

- **Perspektif Pasar (Libertarian/Neoliberal):** Teori ekonomi pasar bebas—terutama sebagaimana dirumuskan oleh Mazhab Austria—mengembangkan konsep "tatanan spontan" (*spontaneous order*). Pasar dipandang sebagai mekanisme koordinasi informasi yang sangat kompleks yang muncul secara alami dari tindakan jutaan individu tanpa perlu ada perencana pusat (Hayek, 1973).

Pertemuan kedua gagasan ini menghasilkan narasi sejajar yang saling menguatkan: baik tatanan tradisi maupun tatanan pasar dipandang sebagai struktur yang "organik" dan "alamiah". Setiap campur tangan dari otoritas pusat (seperti Intervensi Negara Kesejahteraan atau Sosialisme) ditolak karena dianggap merusak evolusi alamiah tatanan tersebut (Hayek, 1960; Scruton, 2014).

3. Ilusi Keselarasan Ontologis

Namun, keselarasan pada titik temu ini pada hakikatnya menyimpan kerapuhan ontologis yang fatal. Hak milik pribadi dalam kerangka konservatif bertujuan untuk menambatkan (*to anchor*) manusia pada tanah, komunitas, dan kewajiban moral lintas generasi. Sebaliknya, hak milik pribadi dalam kerangka kapitalisme dirancang untuk melikuidasi (*to liquidate*) aset agar dapat diperdagangkan dengan mudah di pasar global tanpa terikat oleh pertimbangan sentimental atau moralitas lokal (Polanyi, 1944).

Demikian pula, tatanan spontan pasar bersifat amoral dan tidak memedulikan pemeliharaan nilai-nilai kebaikan,

sedangkan tatanan alamiah tradisi sarat dengan nilai moral normatif. Dengan menyamakan "tatanan spontan pasar" yang terus berubah demi akumulasi modal dengan "tatanan organik tradisi" yang mempertahankan keberlanjutan moral, aliansi ini menciptakan ilusi keselarasan yang menyembunyikan bahaya komodifikasi terhadap tradisi itu sendiri.

Paradoks Internal: Kreativitas Disruptif vs. Stabilitas Tradisi

Setelah menelaah ilusi keselarasan pada konsep hak milik dan tatanan alamiah, analisis filsafat harus melangkah ke jantung kontradiksi internal yang memisahkan pasar dan tradisi. Di balik retorika aliansi politiknya, terdapat benturan ontologis yang mendasar: modus operandi pasar yang digerakkan oleh prinsip kreativitas disruptif (*creative destruction*) secara langsung menghancurkan fondasi utama dari stabilitas tradisi.

1. Dinamika *Creative Destruction* dan Komodifikasi Tanpa Henti

Dalam analisis pasca-klasik mengenai mekanisme kapitalisme, Joseph Schumpeter (1942) mengidentifikasi bahwa esensi dari pertumbuhan pasar bebas bukanlah efisiensi statis, melainkan sebuah proses revolusi ekonomi yang tiada henti dari dalam. Proses ini, yang ia sebut sebagai *creative destruction* (penghancuran kreatif), secara konstan memusnahkan struktur ekonomi yang lama dan menciptakan

struktur baru secara berkesinambungan. Untuk mempertahankan laju profitabilitas dan akumulasi modal, pasar menuntut fleksibilitas mutlak, pembongkaran regulasi, dan penciptaan hasrat-hasrat baru secara artifisial (Harvey, 2005).

Dampak ontologis dari dinamika ini adalah komodifikasi total terhadap aspek-aspek eksistensi manusia. Sebagaimana diperingatkan oleh Karl Polanyi (1944), ketika tanah, tenaga kerja, dan uang ditransformasikan menjadi "komoditas fiktif" yang diperjualbelikan secara bebas tanpa batasan moral, hubungan-hubungan sosial asli manusia terurai (*disembedded*) dari matriks kebudayaannya. Kapitalisme tidak dapat membiarkan ada satu pun ranah kehidupan yang terisolasi dari logika pertukaran; segalanya—termasuk ritme kehidupan keluarga, ruang publik, hingga situs-situs keagamaan dan adat—harus dilikuidasi demi efisiensi pasar (Habermas, 1987).

2. Erosi Nilai Konservatif oleh Logika Pasar

Di sisi lain, filsafat konservatif bertumpu pada keyakinan bahwa eksistensi manusia yang beradab membutuhkan batas-batas (*limits*), kebiasaan (*habits*), dan kelembagaan yang relatif konstan untuk mencegah kekacauan moral dan disintegrasi sosial (Burke, 1790; Scruton, 2012). Tradisi membutuhkan waktu, keheningan, serta rasa hormat terhadap hal-hal yang dipandang sakral atau tak ternilai (*inviolable*).

Namun, logika pasar bebas secara langsung mengikis nilai-nilai yang berusaha dipertahankan oleh konservatisme:

- **Erosi Lembaga Keluarga dan Komunitas:** Kapitalisme menuntut mobilitas tenaga kerja yang tinggi dan jam kerja yang fleksibel. Tuntutan ini meretas struktur keluarga tradisional dan merusak keterikatan geografis pada komunitas lokal yang diandalkan oleh kaum konservatif (Deneen, 2018).
- **Pergeseran Moralitas, dari *Self-Restraint* ke Konsumerisme:** Nilai-nilai konservatif klasik seperti penundaan pemuasan (*delayed gratification*), kesederhanaan, dan penguasaan diri ditenggelamkan oleh industri iklan modern yang justru mengeksploitasi pemicu hasrat instant, hedonisme, dan konsumerisme berlebihan demi sirkulasi modal yang lebih cepat (Bell, 1976).
- **Penyamaan Nilai dengan Harga:** Pasar cenderung menetralkan nilai-nilai kualitatif dan transenden menjadi angka-angka kuantitatif. Ketika kebudayaan dan tradisi diukur semata-mata berdasarkan kontribusi finansialnya (misalnya, sekadar objek pariwisata komersial), tradisi tersebut telah kehilangan kedalaman ontologisnya dan terdistorsi menjadi komoditas dangkal (Fisher, 2009).

3. Akibat Filosofis: *The Cultural Contradictions of Capitalism*

Dengan demikian, timbul sebuah paradoks internal yang melumpuhkan: kapitalisme secara sistematis menghancurkan kebudayaan dan norma-norma sosial konservatif yang awalnya memberi iklim stabil bagi pasar itu sendiri untuk

beroperasi. Daniel Bell (1976) menyebut fenomena ini sebagai *the cultural contradictions of capitalism*—situasi di mana etika kerja dan disiplin moral puritan yang melahirkan kapitalisme awal justru dikikis oleh budaya konsumerisme yang diciptakan oleh perkembangan kapitalisme lanjut.

Pasar menuntut kepatuhan moral dan stabilitas hukum yang disediakan oleh tradisi, tetapi pada saat yang sama, komodifikasi tanpa batas yang diusung oleh pasar terus-menerus merusak fondasi moral tersebut. Ketegangan ini membuktikan bahwa aliansi antara kreativitas disruptif pasar dan stabilitas tradisi bukanlah sebuah harmoni, melainkan kontradiksi internal yang selalu mengancam untuk saling menghancurkan.

Kritik Ontologis: Kapitalisme yang Memanfaatkan Nilai Konservatif demi Legitimasi

Setelah mengurai kontradiksi internal antara daya disruptif pasar dan stabilitas tradisi, analisis kini sampai pada puncak kritik ontologisnya: mengapa aliansi yang kontradiktif ini tetap bertahan kuat? Jawabannya terletak pada fungsi instrumental dan kooptatif dari nilai-nilai konservatif bagi kelangsungan sistem kapitalisme. Dalam perspektif kritik ontologis, hubungan ini bukan sekadar ketidaksengajaan sejarah, melainkan bentuk simbiotik asimetris tempat kapitalisme secara sistematis memanipulasi, mendeduksi, dan mengeksploitasi entitas tradisi sebagai "tameng moral" (*moral*

shield) dan instrumen legitimasi eksistensialnya (Brown, 2015; Sloterdijk, 2013).

1. **Tradisi sebagai Subsumsi Khayal dan Ekternalisasi Biaya Sosial**

Kapitalisme, pada hakikatnya, tidak mampu memproduksi nilai-nilai etisnya sendiri. Rasionalitas pasar murni yang hanya mengenal kalkulasi untung-rugi dan ekspansi akumulasi tidak dapat melahirkan ikatan solidaritas, kejujuran, kepatuhan hukum, atau pengorbanan diri—padahal seluruh kualifikasi etis ini sangat dibutuhkan agar transaksi pasar dapat berjalan tanpa biaya kecurangan (*transaction cost*) yang amat tinggi (Streeck, 2016). Di sinilah kapitalisme melakukan eksternalisasi biaya sosial (*social cost externalization*): ia mengandalkan institusi-institusi konservatif—seperti keluarga, komunitas lokal, dan institusi keagamaan—untuk memproduksi manusia-manusia yang disiplin dan bermoral secara "gratis" tanpa mengeluarkan modal untuk merawatnya (Fraser, 2016).

Institusi keluarga tradisional, misalnya, difungsikan oleh pasar sebagai jaring pengaman sosial informal ketika negara absen dan ketidakpastian pasar menghantam individu. Beban krisis ekonomi, pengangguran, dan kerentanan psikologis yang diakibatkan oleh dinamika pasar dialihkan untuk ditanggung oleh ruang domestik dan solidaritas komunitas (Deneen, 2018). Dengan cara ini, kapitalisme menyerap "modal sosial" yang disediakan oleh tradisi, sembari secara

simultan mengikis daya tahan institusi-institusi tersebut melalui komodifikasi yang tiada henti.

2. **Kooptasi Nilai: Mematikan Radikalisme Etis Tradisi**

Kritik ontologis juga mengungkapkan bagaimana kapitalisme mengalami subsumsi terhadap doktrin konservatif dengan cara mensterilkan daya kritis tradisi itu sendiri. Tradisi dan nilai-nilai keagamaan klasik pada dasarnya memuat kritik yang sangat tajam terhadap kerakusan (*greed*), komodifikasi, dan penyembahan terhadap materi (MacIntyre, 1981). Namun, dalam persinggungan dengan kapitalisme, nilai-nilai konservatif direduksi menjadi komoditas identitas, wacana moralitas individual yang dangkal, atau sekadar *rhetoric culture wars* (perang budaya).

Mekanisme legitimasi ini bekerja melalui dua tahapan ontologis:

- **Penyelubungan Akumulasi (*Masking*):** Eksploitasi ekonomi dan ketimpangan struktural disembunyikan di balik retorika pemeliharaan "kebebasan", "hak milik", dan "tatanan keluarga". Ketidakadilan yang diproduksi oleh pasar ditafsirkan bukan sebagai kegagalan sistemik, melainkan sebagai akibat dari dekadensi moral individu yang "menyimpang dari tradisi" (Brown, 2019).
- **Pengalihan Amarah Sosial:** Ketika masyarakat mengalami kecemasan dan ketidakpastian akibat *creative destruction* pasar, kapitalisme mengarahkan ketakutan tersebut bukan kepada sistem ekonomi, melainkan kepada ancaman luar—seperti imigran,

pergeseran budaya, atau hilangnya "nilai-nilai luhur masa lalu" (Žižek, 2008). Tradisi digunakan sebagai candu normatif untuk menjinakkan potensi resistensi struktural.

3. Degradasi Ontologis: Dari *Sacred* menjadi *Brand*

Pada akhirnya, pertautan ini berujung pada degradasi status ontologis tradisi itu sendiri. Tradisi yang tadinya merupakan modus keberadaan (*mode of being*) yang sakral, konstan, dan transenden, direduksi menjadi alat kelengkapan ideologis (*ideological apparatus*) demi kelangsungan tatanan ekonomi yang profan dan sangat instabil. Nilai-nilai konservatif ditransformasikan dari tatanan moral yang mandiri menjadi sekadar *brand identity* atau perisai politik untuk membela kepentingan oligarki ekonomi (Fisher, 2009).

Dengan demikian, keterikatan antara kapitalisme dan nilai-nilai konservatif merupakan bentuk parasitme ideologis: pasar membutuhkan legitimasi dan stabilitas moral dari tradisi untuk bertahan hidup, tetapi proses keberlanjutan pasar itu sendiri menuntut perusakan dan penghancuran terus-menerus terhadap tradisi yang melindunginya.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, analisis ontologis ini membuktikan bahwa hubungan antara kapitalisme pasar bebas dan nilai-nilai konservatif bukanlah sebuah harmonisasi yang sejati,

melainkan sebuah simbiosis parasitis yang sarat kontradiksi internal. Di permukaan, aliansi politik di antara keduanya tampak wajar karena dipertemukan oleh keyakinan bersama akan pentingnya hak milik pribadi dan penolakan terhadap rekayasa sosial otoriter. Namun, analisis filsafat yang lebih mendalam menunjukkan bahwa gagasan tentang "tatanan spontan pasar" dan "tatanan organik tradisi" bergerak pada modus keberadaan yang saling bertolak belakang.

Pasar bertumpu pada ontologi likuiditas, akselerasi, dan perubahan tiada henti (*becoming*), tempat segala entitas direduksi menjadi komoditas dengan nilai tukar yang fluktuatif. Sebaliknya, tradisi berakar pada ontologi ketetapan, keterikatan, dan nilai transenden (*being*) yang menuntut pemeliharaan batas-batas moral lintas generasi. Ketika dinamika *creative destruction* kapitalisme bekerja tanpa batasan, ia secara sistematis mengikis struktur keluarga, melikuidasi ikatan komunitas lokal, dan menggantikan etika penguasaan diri dengan budaya konsumerisme hedonistis. Pasar secara tidak langsung menghancurkan fondasi sosial dan moral yang justru dibutuhkannya untuk beroperasi secara stabil.

Ketahanan aliansi ini pada akhirnya tidak didasarkan pada keselarasan filosofis, melainkan pada keunggulan kapitalisme dalam mengooptasi tradisi demi legitimasi eksistensialnya. Kapitalisme memanfaatkan institusi-institusi konservatif sebagai penyedia jaring pengaman sosial gratis dan menggunakan nilai-nilai luhur masa lalu sebagai perisai ideologis untuk menutupi ketimpangan serta krisis struktural

yang diproduksinya. Tradisi direduksi dari sebuah modus eksistensi yang sakral menjadi sekadar instrumen legitimasi politik dan komoditas identitas yang dangkal.

Dengan demikian, keterikatan antara pasar dan tradisi secara ontologis bersifat tidak berkelanjutan (*unsustainable*). Selama nilai-nilai konservatif terus dijadikan alat kelengkapan ideologis bagi ekspansi komodifikasi tanpa batas, tradisi tidak akan pernah benar-benar terlindungi; ia justru akan terus tergerus oleh instrumen yang diklaim sebagai sekutunya sendiri.

Daftar Pustaka

Alchian, A. A., & Demsetz, H. (1973). The Property Rights Paradigm. The Journal of Economic History, 33(1), 16–27.

Bell, D. (1976). The Cultural Contradictions of Capitalism. New York: Basic Books.

Brown, W. (2015). Undoing the Demos: Neoliberalism's Stealth Revolution. New York: Zone Books.

Brown, W. (2019). In the Ruins of Neoliberalism: The Rise of Antidemocratic Politics in the West. New York: Columbia University Press.

Burke, E. (1790). Reflections on the Revolution in France. London: J. Dodsley.

Deneen, P. J. (2018). Why Liberalism Failed. New Haven: Yale University Press.

Fisher, M. (2009). Capitalist Realism: Is There No Alternative? Winchester: Zero Books.

Fraser, N. (2016). Contradictions of Capital and Care. New Left Review, 100, 99–117.

Habermas, J. (1987). The Theory of Communicative Action, Volume 2: Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason. Boston: Beacon Press.

Harvey, D. (2005). A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press.

Hayek, F. A. (1945). The Use of Knowledge in Society. The American Economic Review, 35(4), 519–530.

Hayek, F. A. (1960). The Constitution of Liberty. Chicago: University of Chicago Press.

Hayek, F. A. (1973). Law, Legislation and Liberty, Volume 1: Rules and Order. Chicago: University of Chicago Press.

Hegel, G. W. F. (1821). Elements of the Philosophy of Right (A. W. Wood, Ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Kirk, R. (1953). The Conservative Mind: From Burke to Eliot. Chicago: Regnery.

Locke, J. (1689). Two Treatises of Government. London: Awnsham Churchill.

MacIntyre, A. (1981). After Virtue: A Study in Moral Theory. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

Mises, L. v. (1949). Human Action: A Treatise on Economics. New Haven: Yale University Press.

North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.

Oakeshott, M. (1962). Rationalism in Politics and Other Essays. London: Methuen.

Polanyi, K. (1944). The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. New York: Farrar & Rinehart.

Rescher, N. (1996). Process Metaphysics: An Introduction to Process Philosophy. Albany: State University of New York Press.

Schumpeter, J. A. (1942). Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper & Brothers.

Scruton, R. (2012). Green Philosophy: How to Think Seriously About the Planet. London: Atlantic Books.

Scruton, R. (2014). How to Be a Conservative. London: Bloomsbury Continuum.

Simmel, G. (1907). The Philosophy of Money (D. Frisby, Ed.). London: Routledge.

Sloterdijk, P. (2013). In the World Interior of Capital: Towards a Philosophical Theory of Globalization. Cambridge: Polity Press.

Streeck, W. (2016). How Will Capitalism End? Essays on a Failing System. London: Verso.

Žižek, S. (2008). In Defense of Lost Causes. London: Verso.